

Gap Ekspektasi Kualitas Laporan Keuangan Kampung antara Pengelola Keuangan dan Masyarakat di Distrik Sentani Kabupaten Jayapura

Bill Pangayow, SE., M.Si., Ak

Abstrak

Penilaian yang baik dari masyarakat terhadap kualitas laporan keuangan akan menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelola keuangan kampung. Sebaliknya, penilaian yang rendah dari masyarakat terhadap kualitas laporan keuangan akan menyebabkan turunnya kepercayaan pengelolaan keuangan terhadap pengelola. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji perbedaan ekspektasi kualitas keuangan kampung di Distrik Sentani Kabupaten Jayapura. Alat analisis yang digunakan yaitu *Independent sample t-test* dengan menggunakan *software* SPSS.

Terdapat perbedaan signifikan variabel Kualitas Laporan Keuangan antara pengelola keuangan dan masyarakat. Pengelola keuangan menilai lebih tinggi kualitas laporan keuangan dibandingkan dengan masyarakat. Dari indikator yang digunakan dalam penelitian, terdapat perbedaan signifikan pada indikator informasi dalam laporan keuangan dinyatakan dalam istilah yang mudah dipahami dan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji. Pengelola keuangan menilai lebih tinggi kualitas laporan keuangan pada kedua indikator tersebut dibandingkan dengan masyarakat. Pengelola keuangan kampung perlu meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga dapat dinilai baik oleh masyarakat dan akan menimbulkan kepercayaan pengelolaan keuangan kampung dari masyarakat kepada pengelola keuangan.

Kata kunci: Gap Ekspektasi, Kualitas Laporan Keuangan, Keuangan Kampung, Distrik Sentani

1. Pendahuluan

Pemerintahan Desa atau di Provinsi Papua disebut Kampung adalah pemerintah terkecil yang dapat mengelola keuangannya secara independen. Sebagai pengelola keuangan, pemerintah kampung harus mempertanggungjawabkan keuangan yang dikelola dengan menyusun laporan keuangan. Pemerintah kampung memiliki tiga sumber dana utama yaitu dari pemerintah pusat melalui Dana Desa, Dana PROSPEK dari Pemerintah Provinsi Papua dan Alokasi Dana Desa dari Kabupaten/Kota kepada kampung. Besarnya jumlah dana yang dikelola bisa mencapai 2 milyar per tahun berdasarkan ketiga penerimaan dana tersebut. Selain itu, pemerintah kampung juga memiliki Pendapatan Asli Kampung yang diperoleh dari aktivitas hasil usaha, swadaya/partisipasi masyarakat atau lain-lain pendapatan asli kampung.

Pelaporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan akan dilakukan mulai tahun 2017. Sebelumnya, telah dilakukan pelaporan keuangan sederhana yang hanya menampilkan jumlah penerimaan dan pengeluaran dana kampung tanpa proses akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan. Pelaporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan salah satu aspek dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Asni dkk, 2013; Kurrohman, 2015; Rustiarini, 2016). Laporan keuangan yang dibuat berdasarkan aturan akan meningkatkan kualitasnya. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*) dengan elemen-elemennya yaitu transparansi, akuntabilitas, responsivitas, dan partisipasi perlu diterapkan dalam setiap instansi pemerintahan dari tingkat tertinggi pemerintah pusat sampai dengan pemerintah kampung (Yulihantini dan Wardayati, 2016). Dalam penggunaannya, pengelola dana kampung melakukan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana dan akan diawasi oleh musyarawah kampung (Kazimoto, 2013; Siburian, 2014; Yuhertiana dkk, 2016).

Pengelola dana kampung perlu memiliki pengetahuan yang baik terhadap pelaporan keuangan dan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai dasar penyusunan laporan dan untuk meningkatkan kualitas tata kelola. Musyawarah kampung perlu mengetahui mengenai pelaporan keuangan sebagai dasar untuk mengawasi pengelolaan keuangan. Oleh sebab itu, diperlukan persepsi yang sama antara pengelola dana dan musyawarah kampung terhadap pelaporan keuangan dan tata kelola pemerintahan yang baik. Penilaian yang baik terhadap kualitas laporan keuangan kampung oleh masyarakat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan dan sebaliknya penilaian yang kurang baik akan menurunkan kepercayaan pengelolaan keuangan. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, terdapat perbedaan pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan antara penyusun laporan keuangan dan pengawas penggunaan dana (Yuliati dkk, 2007; Rusliyawati dan Halim, 2008; Tumenggung, 2016). Terdapat *expectation gap* antara pengelola dan pengawas penggunaan dana yang masih perlu diteliti.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka perlu diteliti gap ekspektasi kualitas laporan keuangan antara pengelola keuangan dan masyarakat. Manfaat penelitian ini yaitu untuk menginvestigasi persepsi pengelola keuangan dan masyarakat kampung dalam pengelolaan dana di Kampung sehingga baik pengelola maupun masyarakat dapat mengelola dan mengawasi penggunaan dana kampung sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Tinjauan Pustaka

A. Desa

Berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Pemerintah Desa

Menurut Permendagri No.113 Tahun 2014 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

C. Konsep Akuntansi Sektor Publik

Anggaran dana desa yang diberikan oleh pemerintah sebesar 10% dari APBN merupakan salah satu contoh dari dana publik. Anggaran dana desa yang sepenuhnya diperuntukan untuk masyarakat sudah semestinya harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip manajemen publik yang baik dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat dan mensejahterakan masyarakat. Dalam hal ini bahwa dalam pengelolaan anggaran dana desa tersebut harus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas publik. Selain itu, Kampung di Provinsi Papua memperoleh dana PROSPEK dari Provinsi dan Alokasi Dana Desa dari kabupaten/kota.

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Dalam pasal 72 Undang-Undang Desa, Pendapatan desa terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa);
- c. Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi Dana Desa;
- e. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan Sumbangan yang Tidak Mengikat dari Pihak Ketiga;

g. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah.

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja desa terdiri dari:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Bidang Belanja Tak Terduga.

APBDesa merupakan suatu informasi tentang rincian segala aktivitas dan kegiatan desa serta rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa.

Laporan keuangan menurut Permendagri No.113 Tahun 2014 yang wajib dilaporkan oleh pemerintah desa, terdiri dari:

1. Anggaran
2. Buku kas
3. Buku pajak
4. Buku bank
5. Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

D. Akuntansi Desa

Akuntansi adalah suatu aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan. Akuntansi Desa adalah suatu proses pencatatan transaksi yang terjadi di desa disertai dengan bukti-bukti transaksi yang akan disajikan dalam laporan keuangan desa untuk digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan desa tersebut.

E. Aspek-Aspek dan Karakteristik Akuntansi Desa

Adapun aspek-aspek dari akuntansi desa adalah sebagai berikut:

1. Aspek fungsi

Akuntansi menyajikan informasi kepada suatu entitas (misalnya pemerintahan Desa) untuk melakukan tindakan yang efektif dan efisien. Fungsi tindakan tersebut adalah untuk melakukan perencanaan, pengawasan, dan menghasilkan keputusan bagi pimpinan entitas (misalnya Kepala Desa) yang dapat dimanfaatkan baik oleh pihak internal maupun eksternal.

2. Aspek aktivitas

Suatu proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi data, menjadi sebuah data yang relevan, yang kemudian dianalisis dan diubah menjadi sebuah informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

F. Pihak-Pihak Pengguna Akuntansi Desa

Pihak-pihak yang membutuhkan dan menggunakan informasi keuangan desa adalah:

- a. Pihak Internal. Pihak internal adalah pihak yang berada di dalam struktur organisasi Desa, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara, dan Kepala Urusan/Kepala Seksi.
- b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa membutuhkan informasi keuangan desa untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).
- c. Pemerintah. Dalam hal ini baik pemerintah pusat, pemerintah Provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota mengingat bahwa anggaran Desa berasal baik dari APBN dan APBD melalui transfer, bagi hasil, dan bantuan keuangan.

- d. Pihak lainnya. Selain pihak-pihak yang telah disebutkan sebelumnya, masih banyak lagi pihak yang memungkinkan untuk melihat laporan keuangan Desa, misalnya Lembaga Swadaya Desa, RT/RW, serta masyarakat desa.

G. Prinsip-Prinsip Akuntansi Desa

Prinsip akuntansi adalah sebuah nilai-nilai yang dijadikan panutan dan dipatuhi oleh pembuat standar akuntansi. Namun, pada kenyataannya prinsip akuntansi bukan merupakan parameter wajib. Hal itu dikarenakan prinsip akuntansi pada hakikatnya mengawasi dan memberikan rambu-rambu dengan ketentuan yang jelas dan sudah diakui kebenarannya.

Ada beberapa prinsip akuntansi yang digunakan:

1. Prinsip harga perolehan

Prinsip ini mempunyai aturan bahwa harga perolehan dari harta (aset), kewajiban/utang, dan pendapatan dihitung dari harga perolehan sesuai dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak yang bertransaksi.

2. Prinsip Realisasi Pendapatan

Prinsip ini merupakan pembahasan mengenai bagaimana mengukur dan menentukan nilai dari pendapatan yang diperoleh. Pengukuran pendapatan dapat diukur dengan penambahan harta (aset) dan berkurangnya utang atau bertambahnya jumlah kas. Pencatatan pendapatan pada pemerintah Desa pada dasarnya dilakukan pada saat terjadinya transaksi dan dapat dilihat berdasarkan jumlah kas yang diterima.

3. Prinsip Objektif

Prinsip ini merujuk pada laporan keuangan yang didukung oleh bukti-bukti transaksi yang ada. Jika tidak ada bukti transaksi, maka tidak ada pencatatan transaksi. Prinsip ini memerlukan pengawasan dan pengendalian pihak intern untuk menghindari terjadinya kecurangan-kecurangan untuk memanipulasi bukti transaksi dan pencatatannya.

4. Prinsip Pengungkapan Penuh

Dalam pembuatan laporan keuangan desa hendaknya mengungkapkan sebuah informasi penuh yang tersaji dengan baik secara kualitatif dan kuantitatif yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

5. Prinsip konsistensi

Dalam pembuatan laporan keuangan harus mempunyai nilai konsistensi dalam menggunakan metode, pedoman, dan standar dalam pembuatannya. Laporan keuangan juga harus mempunyai nilai banding, yang artinya laporan keuangan dapat dibandingkan dengan pemerintah desa lainnya dengan periode yang sama atau sebaliknya.

H. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah (Jurniadi dkk, 2015).

I. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Media penatausahaan berupa buku kas umum, buku pajak, buku bank serta setiap bulan membuat laporan pertanggungjawaban bendahara.

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh bendahara desa adalah:

1. Buku Kas Umum
2. Buku Kas Pembantu Pajak
3. Buku Bank

J. Pelaporan

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban, kepala desa wajib:

1. Menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:
 - a. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
 - b. Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.
2. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.
3. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota.
4. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

K. Pertanggungjawaban

Permendagri No 113 Tahun 2014 pertanggungjawaban terdiri dari:

1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan dilampiri:
 - a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun anggaran berkenaan.
 - b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
 - c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud diatas, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

L. Asas Pengelolaan Dana Desa

Transparan

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Transparansi juga berarti adanya penjelasan manajemen organisasi sektor publik tentang aktivitas, program, dan kebijakan yang sudah, sedang dan akan dilakukan beserta sumber daya yang digunakan.

Transparansi pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip *Good Governance* yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Dengan dilakukannya transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual, sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk:

1. Membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan (realisasi v.s anggaran).
2. Menilai ada tidaknya unsur korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran.
3. Menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait.
4. Mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait.

Akuntabel

Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan yang tertulis yang informatif dan transparan (Dura, 2016). Mardiasmo (2010) mengatakan “akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak

pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut". Dalam melaksanakan akuntabilitas publik, organisasi sektor publik berkewajiban untuk memberikan informasi sebagai bentuk pemenuhan hak-hak publik.

Akuntabilitas yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Husin, 2016).

Partisipatif

Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa. Pengelolaan Keuangan Desa, sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban wajib melibatkan masyarakat, para pemangku kepentingan di desa serta masyarakat luas, utamanya kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan di Desa.

M. Pengembangan Hipotesis

Perbedaan persepsi antara penyusun laporan keuangan dan pengawas keuangan dapat terjadi karena penyusun laporan lebih mengetahui mengenai peraturan tentang penyusunan laporan keuangan. Pengelola keuangan kampung memiliki pengetahuan yang lebih daripada Badan Musyawarah Kampung karena pengelola keuangan telah mengikuti pelatihan dan memiliki pengalaman dalam pertanggungjawaban dana kampung. Penilaian yang tinggi oleh masyarakat terhadap kualitas laporan keuangan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelola keuangan. Hipotesis yang dibentuk adalah:

Ha: Terdapat perbedaan Kualitas Laporan Keuangan antara Pengelola Keuangan Kampung dan Badan Musyawarah Kampung

3. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang menjelaskan dan memprediksi fenomena yang terjadi lapangan. Penelitian ini menguji perbedaan kualitas laporan keuangan antara penyusun dan pengawas laporan keuangan.

Populasi penelitian adalah masyarakat yang ada di kampung di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura. Metode penentuan sampel adalah *Judgment Sampling* yaitu peneliti menentukan sampel berdasarkan kepentingan dalam penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah pengelola keuangan dan masyarakat di kampung Ifaar Besar, Yobeh, Sereh dan Yahim.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan sumber data yaitu data primer melalui kuesioner kepada responden. Variabel dalam penelitian ini adalah Kualitas Laporan Keuangan Kampung.

Uji Kualitas Data

Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu mengukur apa yang diukur. Validitas item ditunjukkan dengan adanya korelasi atau dukungan terhadap item total (skor total), perhitungan dilakukan dengan cara mengkorelasikan antara skor item dengan skor total item. Dalam penentuan layak atau tidaknya suatu item yang akan digunakan, biasanya dilakukan uji signifikansi koefisien korelasi pada taraf signifikansi 0,05, artinya suatu item dianggap valid jika berkorelasi signifikan terhadap skor total.

Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang digunakan dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan

data dan mampu mengungkap informasi yang sebenarnya dilapangan. Pengujian reliabilitas instrumen dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach karena instrumen penelitian ini berbentuk angket dan skala bertingkat. Jika $\alpha > 0.90$ maka reliabilitas sempurna. Jika α antara $0.70 - 0.90$ maka reliabilitas tinggi. Jika α $0.50 - 0.70$ maka reliabilitas moderat. Jika $\alpha < 0.50$ maka reliabilitas rendah. Jika α rendah, kemungkinan satu atau beberapa item tidak reliabel.

Metode Analisis Data

Pengujian Perbedaan Persepsi

Hipotesis yang menguji perbedaan persepsi aparat dan masyarakat berkaitan dengan Persepsi atas Laporan Keuangan, Penggunaan Informasi Akuntansi, Kualitas Laporan Keuangan dan Tata Kelola Pemerintahan Kampung menggunakan alat analisis *Independent Sample T-Test* dengan menggunakan SPSS. Hipotesis penelitian diterima jika terdapat perbedaan signifikan yang ditandai dengan nilai $p < 0,05$ (hipotesis diterima pada tingkat kepercayaan 95%).

4. Hasil dan Pembahasan

Karakteristik Responden

Berdasarkan hasil tabulasi data, nampak bahwa aparat dan masyarakat yang dijadikan sebagai responden menyebar secara merata baik di antara kelompok masyarakat dan empat kampung yang dapat diperoleh respondennya.

Tabel 1. Karakteristik Responden

Karakteristik		Persentase
Kelompok	Aparat	51%
	Masyarakat	49%
Kampung	Yobeh	25%
	Ifaar Besar	26%
	Yahim	25%
	Sereh	25%
Jenis Kelamin	Laki-laki	65%
	Perempuan	35%

Hasil Analisis Data

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Uji validitas data diperlukan untuk menguji apakah indikator dalam variabel adalah valid untuk mengukur suatu variabel. Berikut ini disajikan hasil penghitungan validitas untuk semua variabel dalam penelitian.

Tabel 2. Uji Validitas Variabel Kualitas Laporan Keuangan

No.	Indikator	Signifikansi	Keterangan
1.	Laporan keuangan yang dihasilkan dapat membantu dalam memperkirakan aktivitas yang berhubungan dengan keuangan pada periode berikutnya	0,000	Valid
2.	Laporan keuangan yang dihasilkan dapat membantu dalam pengambilan keputusan	0,000	Valid
3.	Laporan keuangan yang dihasilkan dan berkualitas memenuhi persyaratan normatif yaitu relevan, andal, dapat dipercaya dan dapat dibandingkan	0,000	Valid
4.	Setiap informasi dalam laporan keuangan yang dihasilkan disertai dengan penjelasan yang rinci sehingga kekeliruan dalam interpretasi dan penggunaan informasi tersebut dapat	0,000	Valid

	dicegah		
5.	Informasi dalam laporan keuangan yang dihasilkan telah menggambarkan secara jujur semua transaksi dan peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan	0,000	Valid
6.	Informasi dalam laporan keuangan dinyatakan dalam istilah yang mudah dipahami	0,000	Valid
7.	Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji dan apabila pengujian dilakukan oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh	0,000	Valid
8.	Laporan keuangan yang disajikan menggambarkan kondisi keuangan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan	0,000	Valid

Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas variabel ditujukan untuk dapat menilai apakah indikator telah dapat mengukur variabel secara andal. Berikut ini adalah hasil perhitungan reliabilitas variabel.

Tabel 3. Uji Reliabilitas

No.	Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
1.	Kualitas Laporan Keuangan	0.670	Reliabel

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa indikator dapat mengukur variabelnya sebesar lebih dari 0.6 yang berarti bahwa indikator yang ada sangat reliabel.

Pengujian Hipotesis

Berikut ini adalah hasil perhitungan perbedaan mean untuk masing-masing variabel, baik dari aparat maupun dari masyarakat.

Tabel 4. Perbedaan mean untuk empat variabel berdasarkan kelompok masyarakat

No.	Variabel	Mean Masyarakat	Mean Aparat
A.	Kualitas Laporan Keuangan	28.91	30.82
1.	Laporan keuangan yang dihasilkan dapat membantu dalam memperkirakan aktivitas yang berhubungan dengan keuangan pada periode berikutnya	4.00	4.00
2.	Laporan keuangan yang dihasilkan dapat membantu dalam pengambilan keputusan	4.14	4.31
3.	Laporan keuangan yang dihasilkan dan berkualitas memenuhi persyaratan normatif yaitu relevan, andal, dapat dipercaya dan dapat dibandingkan	3.55	3.77
4.	Setiap informasi dalam laporan keuangan yang dihasilkan disertai dengan penjelasan yang rinci sehingga kekeliruan dalam interpretasi dan penggunaan informasi tersebut dapat dicegah	3.67	3.77
5.	Informasi dalam laporan keuangan yang dihasilkan telah menggambarkan secara jujur semua transaksi dan peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan	3.50	3.71
6.	Informasi dalam laporan keuangan dinyatakan dalam istilah yang mudah dipahami	3.20	3.97
7.	Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji dan	3.20	3.60

	apabila pengujian dilakukan oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh		
8.	Laporan keuangan yang disajikan menggambarkan kondisi keuangan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan	3.61	3.68

Berdasarkan data di atas, nampak bahwa untuk variabel Persepsi atas Laporan Keuangan, Penggunaan Informasi Akuntansi dan Kualitas Laporan Keuangan, terdapat perbedaan *mean* yaitu *mean* aparat lebih tinggi daripada *mean* masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa aparat mempersepsikan ketiga variabel tersebut lebih tinggi dari masyarakat. Ini juga berarti bahwa, aparat lebih mengetahui keadaan dari laporan keuangan, penggunaan informasi akuntansi dan kualitas laporan keuangan cenderung lebih tinggi daripada masyarakat. Untuk variabel keempat yaitu Tata Kelola Pemerintahan Kampung, nampak bahwa masyarakat memiliki persepsi yang cenderung lebih tinggi daripada aparat. Ini juga berarti bahwa masyarakat merasa bahwa tata kelola di kampung mereka lebih tinggi dibandingkan dengan yang dipersepsikan oleh aparat. Aparat merasa bahwa masih ada yang perlu diperbaiki berkaitan dengan tata kelola pemerintahan sehingga mempersepsikan kurang dari yang dipersepsikan oleh masyarakat.

Tabel 9. Hasil Uji *Independent Sample T-Test*

No.	Variabel	Sig. T-Test	Keterangan
A.	Kualitas Laporan Keuangan	0.004	Diterima
1.	Laporan keuangan yang dihasilkan dapat membantu dalam memperkirakan aktivitas yang berhubungan dengan keuangan pada periode berikutnya	1.000	Ditolak
2.	Laporan keuangan yang dihasilkan dapat membantu dalam pengambilan keputusan	0.248	Ditolak
3.	Laporan keuangan yang dihasilkan dan berkualitas memenuhi persyaratan normatif yaitu relevan, andal, dapat dipercaya dan dapat dibandingkan	0.165	Ditolak
4.	Setiap informasi dalam laporan keuangan yang dihasilkan disertai dengan penjelasan yang rinci sehingga kekeliruan dalam interpretasi dan penggunaan informasi tersebut dapat dicegah	0.526	Ditolak
5.	Informasi dalam laporan keuangan yang dihasilkan telah menggambarkan secara jujur semua transaksi dan peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan	0.141	Ditolak
6.	Informasi dalam laporan keuangan dinyatakan dalam istilah yang mudah dipahami	0.000	Diterima
7.	Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji dan apabila pengujian dilakukan oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh	0.011	Diterima
8.	Laporan keuangan yang disajikan menggambarkan kondisi keuangan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan	0.637	Ditolak

Berdasarkan hasil pengujian statistik independent sampel t test, nampak bahwa a variabel Kualitas Laporan Keuangan memiliki perbedaan yang signifikan. Dengan *mean* aparat yang lebih tinggi dan signifikan untuk variabel ini, maka dapat disimpulkan bahwa aparat mempersepsikan kualitas laporan keuangan cenderung lebih tinggi dan signifikan dari masyarakat.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa penilaian variabel kualitas laporan keuangan antara pengelola keuangan lebih tinggi daripada masyarakat. Beberapa indikator yang berbeda signifikan yaitu pada informasi dalam laporan keuangan dinyatakan dalam istilah yang mudah dipahami dan

informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian masyarakat cukup rendah dan hal ini akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelola keuangan kampung. Pengelola keuangan perlu meningkatkan kualitas laporan keuangan bagi masyarakat sehingga dapat meningkatkan penilaian terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan demikian, penilaian yang baik terhadap kualitas laporan keuangan merupakan ukuran bahwa masyarakat mempercayai kualitas laporan keuangan kampung yang dilakukan oleh pengelola keuangan.

5. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan dapat diambil dalam penelitian ini yaitu Terdapat perbedaan signifikan Kualitas Laporan Keuangan antara masyarakat dan pengelola keuangan. Masyarakat menilai kualitas laporan keuangan lebih rendah dari pengelola keuangan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan:

1. Perlu adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparat dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan di kampung.
2. Dari tingkat pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat juga perlu ditingkatkan sehingga akan meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Daftar Pustaka

- Asni F., Maryunani, Sasongko, D. Budi, 2013, The Management of the Village Fund Allocation as an Instrument towards Economic Independence Village (Case Studies in 2 villages in Siak Regency, Province Riau), *IOSR Journal of Business and Management*, Vol. 10, Issue 4
- Dura J., 2016, Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus pada Desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang), *Jurnal JIBEKA*, Vol. 10, No. 1, Agustus 2016
- Ghozali I., 2014, Structural Equation Modelling Metode Alternatif dengan Partial Least Squares (PLS), Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Husin D., 2016, Flexibility of Budget Accountability Using Flow Modification in The Design of Village Financial Accounting, *Asia Pasific Fraud Journal*, Vol. 1, No. 1
- Jurniadi, Djumadi, D. B. Paranoan, 2015, Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur, *eJournal Administrative Reform*, Vol. 1, No. 1
- Kazimoto P., 2013, Analysis of Village Financial Management Challenges in Arumeru District in Tanzania, *International Journal of Research in Social Sciences*, Vol. 3, No. 2

- Kurrohman T., 2015, Accountability of Planning on Village Fund Allocation in Osing Community in Banyuwangi, *Proceedings of The International Conference on Accounting Studies*, Johor Bahru
- Mardiasmo, 2010, Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta, CV. Andi Offset
- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Rusliyawati, A. Halim, 2008, Penginvestigasian Audit Expectation Gap pada Sektor Publik, *Simposium Nasional Akuntansi XI*, Pontianak
- Rustiarini N. W., 2016, Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa, *Simposium Nasional Akuntansi XIX*, Lampung
- Siburian E. D. B., 2014, Peranan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Pengembangan Wilayah Perdesaan di Kabupaten Serdang Bedagai, *Jurnal Ekonom*, Vol. 17, No. 2
- Tumenggung Y. A., 2016, Rural Financial Management in Perspective Law No. 6 of 2014 Concerning The Village, *International Journal of Social Sciences*, Vol. 43, No. 1
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Yuhertiana I., T. D. Widajatie, F. S. Akbar, 2016, Financial Confusion and Corruption Anxiety: A Good Village Governance Pressure, *Simposium Nasional Akuntansi XIX*, Lampung
- Yuliati R., J. Winarna, D. Setiawan, 2007, Expectation Gap antara Pemakai Laporan Keuangan Pemerintah dan Auditor Pemerintah, *Simposium Nasional Akuntansi X*, Makasar
- Yulihantini D. T., S. M. Wardayati, 2016, Financial Accountability in The Management of Village Fund Allocation, *1st International Conference on Business and Accounting Studies*, Jember